



Peningkatan Kapasitas Manajemen Keuangan Desa dalam Mendukung Peningkatan Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Kerinci

Dona Elvia Desi*¹, Poni Yanita², Ida Yusnita³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

email: ¹dona.elde79@gmail.com ²yanitaponi@gmail.com, ³idayusnita3624@gmail.com

Abstract

Improving village self-reliance is a key priority of national development, which is measured through the Village Development Index (Indeks Desa Mandiri/IDM). However, many villages still face limitations in village financial management, resulting in suboptimal achievement of IDM indicators. This community service program aims to enhance the capacity of village officials in village financial management to support the improvement of the Village Development Index in Kerinci Regency. The program employed a capacity-building approach through structured training and mentoring in village financial management, covering planning, budgeting, administration, reporting, and financial accountability. The target participants were village officials directly involved in village financial management in developing and advanced villages. The results indicate an improvement in participants' knowledge and skills in village financial management, enhanced quality of financial planning and reporting documents, and better alignment of budget allocation with village development priorities. Conceptually, these improvements contribute positively to the enhancement of Village Development Index indicators, particularly in the aspect of village governance. This program is expected to support sustainable village self-reliance through strengthened village financial management capacity.

Keywords: MSMEs, mentoring, marketplace, digital marketing

Abstrak

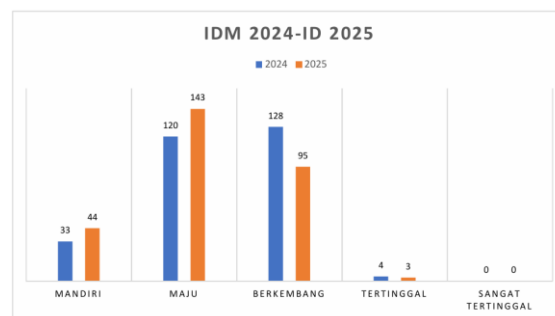
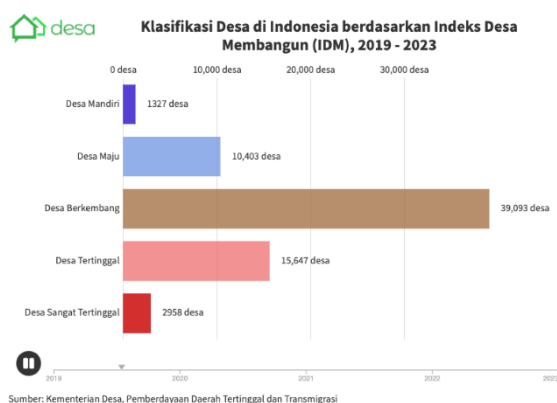
Peningkatan kemandirian desa merupakan salah satu fokus utama pembangunan nasional yang diukur melalui Indeks Desa Mandiri (IDM). Namun, masih terdapat desa yang mengalami keterbatasan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berdampak pada belum optimalnya capaian indikator IDM. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan aparatur desa dalam mendukung peningkatan Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Kerinci. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan peningkatan kapasitas (capacity building) melalui pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sasaran kegiatan adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa pada desa berstatus berkembang dan maju. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam manajemen keuangan desa, perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan desa, serta meningkatnya kesesuaian alokasi anggaran dengan program prioritas pembangunan desa. Secara konseptual, hasil pengabdian ini menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan indikator Indeks Desa Mandiri, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan kemandirian desa secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas manajemen keuangan desa.

Kata kunci: manajemen keuangan desa, Indeks Desa Mandiri, capacity building,

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pemerataan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya pembangunan secara mandiri. Dalam konteks tersebut, pemerintah telah menetapkan Indeks Desa Mandiri (IDM) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kemandirian desa secara komprehensif dan berkelanjutan.

Indeks Desa Mandiri mengklasifikasikan status desa ke dalam lima kategori, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri, yang didasarkan pada nilai indeks tertentu. Klasifikasi ini mencerminkan kondisi objektif desa dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari layanan dasar, kegiatan sosial dan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa.



Berdasarkan data status desa di Kabupaten Kerinci tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya dinamika perkembangan desa yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, jumlah desa dengan status Mandiri tercatat sebanyak 33 desa (11,58%), meningkat menjadi 44 desa (15,44%) pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan desa dan perbaikan kapasitas pengelolaan sumber daya desa di sebagian wilayah Kabupaten Kerinci.

Status Desa Maju juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 120 desa (42,11%) pada tahun 2024 menjadi 141 desa (49,47%) pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir separuh desa di Kabupaten Kerinci telah berada pada fase pembangunan yang relatif stabil dan progresif. Namun demikian, peningkatan jumlah desa maju belum sepenuhnya diikuti oleh pergeseran desa menuju status mandiri secara merata.

Sebaliknya, jumlah Desa Berkembang justru mengalami penurunan cukup tajam, dari 128 desa (44,91%) pada tahun 2024 menjadi 97 desa (34,04%) pada tahun 2025. Penurunan ini dapat dimaknai secara dua arah: sebagian desa berhasil naik kelas menjadi desa maju atau mandiri, namun di sisi lain masih terdapat desa berkembang yang menghadapi kendala struktural sehingga tidak mampu berakselerasi secara optimal.

Untuk kategori Desa Tertinggal, jumlahnya relatif kecil dan cenderung menurun, dari 4 desa (1,40%) pada tahun 2024 menjadi 3 desa (1,05%) pada tahun 2025. Sementara itu, Desa Sangat Tertinggal

tidak ditemukan pada kedua tahun tersebut. Meskipun demikian, keberadaan desa tertinggal menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kapasitas pembangunan desa yang memerlukan intervensi berkelanjutan.

Secara konseptual, pergeseran status desa dari berkembang menuju maju dan mandiri sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen keuangan desa, khususnya dalam perencanaan anggaran berbasis kebutuhan, pelaksanaan program yang efektif, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Desa dengan kapasitas manajemen keuangan yang baik cenderung mampu mengalokasikan Dana Desa secara lebih tepat sasaran, sehingga berdampak langsung pada peningkatan indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Mandiri.

Data Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa meskipun tren peningkatan desa maju dan mandiri cukup positif, masih terdapat proporsi desa berkembang yang relatif besar. Hal ini menandakan perlunya upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, terutama dalam aspek manajemen keuangan desa, agar akselerasi peningkatan status desa dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen keuangan desa dalam mendukung peningkatan Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Kerinci. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan desa yang terstruktur dan aplikatif, diharapkan desa-desa sasaran mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan status desa menuju kategori mandiri.

Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas manajemen keuangan aparatur desa di Kabupaten Kerinci guna mendukung percepatan peningkatan

status desa berdasarkan Indeks Desa Mandiri (IDM) secara berkelanjutan.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang selaras dengan indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Mandiri.
3. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Memfasilitasi desa sasaran agar mampu melakukan akselerasi peningkatan status desa, khususnya dari Desa Berkembang menuju Desa Maju, serta dari Desa Maju menuju Desa Mandiri.
5. Meningkatkan kesadaran aparatur desa terhadap peran strategis pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan mentransformasikan ilmu pengetahuan dan keahlian akademik untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat. Pendekatan pengabdian yang efektif tidak bersifat karitatif, melainkan berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu proses peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan (Chambers, 1995) (Mardikanto & Soebiato, 2013)

Dalam konteks desa, pemberdayaan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur desa sebagai aktor utama pembangunan. Pengabdian berbasis peningkatan kapasitas dipandang mampu menghasilkan dampak jangka panjang karena mendorong perubahan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kelembagaan desa (Haryono & Sari, 2018).

2. Indeks Desa Mandiri sebagai Instrumen Pengukuran Pembangunan Desa

Indeks Desa Mandiri (IDM) merupakan instrumen resmi pemerintah yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa secara komprehensif. IDM mengklasifikasikan desa ke dalam lima status, yaitu Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri, berdasarkan capaian indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian Desa dan Transmigrasi, 2020)

IDM berfungsi sebagai alat pemetaan kondisi desa sekaligus sebagai dasar penentuan kebijakan dan prioritas pembangunan desa. Peningkatan status desa dalam IDM mencerminkan keberhasilan desa dalam mengelola pembangunan secara berkelanjutan dan mandiri.

3. Manajemen Keuangan Desa dalam Perspektif Manajemen Keuangan Publik

Manajemen keuangan desa merupakan bagian dari manajemen keuangan publik yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan keuangan desa yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sejalan dengan Undang-Undang Desa, desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan dan aset desa. Namun, meningkatnya alokasi Dana Desa juga menuntut aparatur desa memiliki kapasitas manajemen keuangan yang memadai. Lemahnya kapasitas tersebut berpotensi

menimbulkan inefisiensi anggaran dan rendahnya kualitas pembangunan desa (Bastian, 2014).

4. Hubungan Manajemen Keuangan Desa dengan Indeks Desa Mandiri

Secara konseptual, kualitas manajemen keuangan desa memiliki keterkaitan langsung dengan capaian Indeks Desa Mandiri. Pengelolaan keuangan desa yang efektif memungkinkan alokasi anggaran yang tepat sasaran pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada indikator IDM, seperti layanan dasar, penguatan ekonomi desa, dan tata kelola pemerintahan desa.

Desa dengan tata kelola keuangan yang baik cenderung memiliki kemampuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai IDM dan pergeseran status desa menuju kategori yang lebih tinggi.

5. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) sebagai Model Pengabdian

Peningkatan kapasitas (capacity building) merupakan pendekatan yang menekankan pada penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif (UNDP, 2009). Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, model ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan praktik langsung yang berkelanjutan.

Pendekatan peningkatan kapasitas dinilai relevan untuk diterapkan pada aparatur desa karena mampu meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa, tata kelola keuangan desa diharapkan menjadi lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil pembangunan (Liantifa, Haryono, & Budaya, 2021).

6. Kerangka Konseptual Model Pengabdian

Berdasarkan kajian pustaka, model

pengabdian ini dibangun atas hubungan kausal sebagai berikut:

peningkatan kapasitas manajemen keuangan desa → perbaikan tata kelola keuangan desa → optimalisasi program pembangunan desa → peningkatan nilai Indeks Desa Mandiri → pergeseran status desa.

Kerangka ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berperan sebagai intervensi strategis untuk mempercepat peningkatan status desa melalui penguatan kapasitas manajemen keuangan desa.

METODE PENGABDIAN

1. Pendekatan dan Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan peningkatan kapasitas (capacity building) dengan metode pelatihan dan pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan aparatur desa, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis dan kemampuan aplikatif dalam pengelolaan keuangan desa (Desi & Abdallah, 2021).

Metode pelaksanaan meliputi:

1. pelatihan manajemen keuangan desa,
2. pendampingan teknis pengelolaan keuangan desa,
3. dan evaluasi capaian kegiatan berbasis Indeks Desa Mandiri.

2. Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian adalah **aparatur desa** yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa terkait. Lokasi kegiatan dilaksanakan pada desa-desa sasaran di Kabupaten Kerinci, dengan prioritas desa berstatus Berkembang dan Maju berdasarkan Indeks Desa Mandiri.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan kegiatan pengabdian berjalan efektif dan sesuai kebutuhan desa sasaran. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait,
 2. identifikasi kondisi awal pengelolaan keuangan desa,
 3. pemetaan status desa berdasarkan Indeks Desa Mandiri,
 4. serta penyusunan materi dan modul pelatihan manajemen keuangan desa.
- b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan



Tahap ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa mengenai manajemen keuangan desa. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. penyampaian materi prinsip-prinsip manajemen keuangan desa,
2. pelatihan perencanaan dan penganggaran desa,
3. pelatihan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa,
4. serta pelatihan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

c. Tahap Pendampingan

Pendampingan dilakukan untuk memastikan aparatur desa mampu menerapkan materi yang telah diperoleh dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pendampingan meliputi:

1. pendampingan penyusunan RKPDes dan APBDes,
2. pendampingan pencatatan dan pelaporan keuangan desa,
3. konsultasi teknis terkait

permasalahan pengelolaan keuangan desa,

4. serta monitoring penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

d. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian dan capaian indikator keberhasilan. Kegiatan evaluasi meliputi:

1. pengukuran peningkatan pemahaman aparatur desa melalui pre-test dan post-test,
2. evaluasi kualitas dokumen keuangan desa sebelum dan sesudah pendampingan,
3. penilaian kontribusi kegiatan terhadap peningkatan indikator Indeks Desa Mandiri,
4. serta perumusan rekomendasi tindak lanjut untuk keberlanjutan kegiatan.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan hasil evaluasi pelatihan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan desa dan data Indeks Desa Mandiri. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian.

5. Indikator Keberhasilan Metode

Keberhasilan metode pelaksanaan diukur berdasarkan:

1. meningkatnya pemahaman aparatur desa terhadap manajemen keuangan desa,
2. meningkatnya kualitas dokumen pengelolaan keuangan desa,
3. meningkatnya kesesuaian program pembangunan dengan indikator IDM,
4. serta adanya kecenderungan peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui rangkaian pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan desa pada desa sasaran di Kabupaten Kerinci. Sasaran kegiatan meliputi aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa terkait.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengabdian, mulai dari persiapan, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Partisipasi aparatur desa tergolong tinggi, ditunjukkan dengan tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif peserta selama proses pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terdapat peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap konsep dan praktik manajemen keuangan desa. Peningkatan tersebut terutama terlihat pada aspek perencanaan dan penganggaran desa, penatausahaan keuangan, serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aparatur desa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesesuaian antara perencanaan anggaran dan program prioritas pembangunan desa.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan pendampingan menghasilkan perbaikan pada kualitas dokumen keuangan desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran desa, seperti RKPDes dan APBDes, disusun secara lebih sistematis dan terstruktur. Alokasi anggaran desa mulai menunjukkan keselarasan yang lebih baik dengan kebutuhan pembangunan desa dan indikator pembentuk Indeks Desa Mandiri.

Hasil monitoring juga menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam ketepatan waktu pencatatan dan pelaporan keuangan. Aparatur desa menjadi lebih memahami

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas manajemen keuangan desa melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan memiliki peran strategis dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa. Peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap manajemen keuangan publik berdampak langsung pada kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa.

Temuan ini sejalan dengan konsep *capacity building* yang menekankan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks desa, aparatur yang memiliki kapasitas manajerial yang memadai cenderung mampu mengelola sumber daya keuangan secara lebih efisien dan berorientasi pada hasil pembangunan (Haryono, Liantifa, Hamdani, Efdison, & Yelnim, 2025).

Perbaikan kualitas dokumen keuangan desa dan meningkatnya kesesuaian alokasi anggaran dengan program prioritas pembangunan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. Optimalisasi ini berimplikasi pada peningkatan capaian indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Mandiri, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan dan kegiatan ekonomi desa.

Meskipun kegiatan pengabdian ini belum secara langsung mengubah status desa dalam Indeks Desa Mandiri pada periode pelaksanaan, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya kecenderungan positif menuju pergeseran status desa. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa menjadi fondasi penting bagi desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Mandiri

secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis peningkatan kapasitas manajemen keuangan desa merupakan intervensi yang relevan dan efektif dalam mendukung upaya peningkatan kemandirian desa. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih luas.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen keuangan desa di Kabupaten Kerinci telah terlaksana dengan baik melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan yang terstruktur. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbaikan kualitas tata kelola keuangan desa, yang tercermin dari penyusunan dokumen keuangan desa yang lebih sistematis, meningkatnya ketepatan waktu pelaporan, serta meningkatnya kesesuaian alokasi anggaran dengan program prioritas pembangunan desa. Perbaikan tata kelola keuangan tersebut berkontribusi positif terhadap optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

Secara konseptual, peningkatan kapasitas manajemen keuangan desa melalui kegiatan pengabdian ini berperan sebagai fondasi penting dalam mendukung peningkatan capaian indikator Indeks Desa Mandiri. Meskipun pergeseran status desa dalam Indeks Desa Mandiri memerlukan waktu dan proses berkelanjutan, hasil pengabdian ini menunjukkan kecenderungan positif menuju

peningkatan kemandirian desa secara bertahap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya pemerintah desa lokasi pengabdian, atas kerja sama, partisipasi, dan dukungan yang diberikan selama kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen keuangan desa. Apresiasi disampaikan kepada seluruh aparatur desa yang telah berpartisipasi aktif dan terbuka dalam menerima pendampingan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan secara efektif.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan tata kelola keuangan desa dan mendukung peningkatan Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- 2) Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* London: Intermediate Technology Publications.
- 3) Desi, D. E., & Abdallah, Z. (2021). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Desa Koto Tuo Ujung Pasir. *JURNAL ABDIMAS SAKTI (JAS)*, 3(1), 12–15.
- 4) Haryono, G., Liantifa, M., Hamdani, D., Efdison, Z., & Yelnim, Y. (2025). *Manajemen Pemasaran Komprehensif, Teori Dan Implementasi Di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- 5) Haryono, G., & Sari, A. E. (2018). Strategi Pemasaran Desa Wisata untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kerinci. *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*,

7(1), 1–12.

- 6) Kementerian Desa dan Transmigrasi, P. D. T. (2020). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 7) Liantifa, M., Haryono, G., & Budaya, I. (2021). Optimalisasi Strategi Bauran Pemasaran Keripik Keladi dan Rengginang UMKM Desa Bento Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci. *JURNAL ABDIMAS SAKTI (JAS)*, 3(2), 40–45.
- 8) Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- 9) Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.